

**DAFTAR BACAAN**

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Budiarjo, Miriam, dan Ibrahimn Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik di Indonesia*, AIPI Jakarta, Jakarta, Cetakan Kedua, 1995.

Faruqi, Harith Sulaeman, *Faruqi's Law Dictionary, Arabic English*, Librairie du Liban, Beirut, 1986.

HR, Ridwan *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

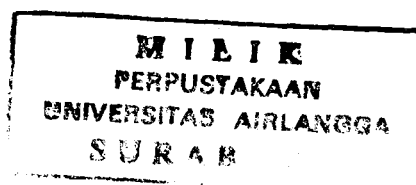
HR, Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Ismawan, Indra, *Money Politics pengaruh uang dalam pilkada*, Media Pressindo Yogyakarta.

JR, Charles L. Black, *Impeachment, a Hand Book*, Yale University Press, New Haven and London, 1998.

Kranenburg, Mr dan Mr Tk. B. Sabaredin, *Ilmu Negara Umum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Locke, John, *Two Treatise of Civil Government*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.



- M Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia\_ Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- M. Hadjon, Philipus, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Airlangga., 1994.
- Mahkamah Konstitusi, *Laporan Penelitian "Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005.
- Manan, Bagir, *Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undang 1945*. Uniska, Bandung, 1993.
- Marbun, B.N., *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen Undang-Undang 1945 & Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Marbun, B.N., *DPRD dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Surabaya, 2009.
- Murphy, John, *The Impeachment Process*, Chelsea House Publishers, New York, 2007.

Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.

Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung.

Samego, Indria, *Masalah Good Governance Di Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Jurnal demokrasi & HAM vol 2. No.2, Juni-September 2002.

Sekretariat Jenderal MPR R.I., *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR R.I. 2003.

Soekarwo et al., *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, 1995, Jakarta

Una, Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah menurut Konstitusi Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.

Webster, Merriam, *Websters Third New International Dictionary*, Merriam-Webster INC., Publishers Springfield. U.S.A.

Zoelva, Hamdan, *Harith Suleiman Faruqi dalam Hamdan Zoelva*, Sinar Grafika, 2011.

Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan).
3. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
4. TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-Luasnya Kepada Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Mengenai Komite Nasional di Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah.

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peeradilan Tata Usaha Negara.
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
14. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD.
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia 5 Juli Tahun 1959 tentang Kembali Pada Undang-Undang Dasar 1945.
23. Surat Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2014 tentang Pemberhentian Kena Ukur.

### **Internet**

1. Anggaran Siluman APBD DKI, [lipsus.kompas.com](http://lipsus.kompas.com), 25 Desember 2015.
2. Bupati Karo Diberhentikan Presiden, [regional.kompas.com](http://regional.kompas.com), 13 Juli 2014.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Provinsi Ibukota Jakarta, [dprd-dkijakartaprovo.go.id](http://dprd-dkijakartaprovo.go.id).

4. Dia pun mengingatkan bahwa DPRD adalah mitra kerja pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan, [manadoonline.com](http://manadoonline.com).
5. Diwacanakan Pemakzulan, Basuki Mengaku Santai, [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), 01 April 2015.
6. DPRD Dinilai Tak Pantas Ajukan Hak Angket, [nasional.republika.co.id](http://nasional.republika.co.id), 04 Maret 2015.
7. DPRD memiliki ketiga fungsi tersebut bertujuan untuk menciptakan mekanisme *check and balance* antar lembaga negara, [hamdanzoelva.wordpress.com](http://hamdanzoelva.wordpress.com), 28 April 2008.
8. DPRD Surabaya Wacanakan Pemakzulan Walikota, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 29 Desember 2010.
9. Empat Kali Wali Kota Risma “diseruduk banteng” Surabaya, [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), 31 Januari 2014.
10. Ini Hasil Akhir Angket DPRD DKI Kepada Basuki, [ads.investor.co.id](http://ads.investor.co.id), 06 Apri 2015.
11. Kata Nuri Shaden hak angket adalah hak bertanya, [megapolitan.kompas.com](http://megapolitan.kompas.com), 27 Februari 2015.
12. Keppres Pemakzulan Bupati Karo Sudah Terbit, [m.jpnn.com](http://m.jpnn.com), 04 Juli 2014.
13. Kilasan Perkembangan Otonomi (Pemerintahan) Daerah di Indonesia, [www.boyyendratamin.com](http://www.boyyendratamin.com), September 2011.

14. Lima Alasan DPRD Rekomendasikan Pemakzulan Bupati Karo, [www.medanbagus.com](http://www.medanbagus.com), 22 Desember 2013.
15. MA Kabulkan Pemakzulan Aceng Fikri, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 23 Januari 2013.
16. MA Kabulkan Pemakzulan Bupati Karo, [hariansib.co](http://hariansib.co), 15 Februari 2014.
17. Perkiraan Penduduk Beberapa Negara (juta) , [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), Data Tahun 2000-2013.
18. PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARO VS BUPATI KARO, [Putusan.mahkamahagung.go.id](http://Putusan.mahkamahagung.go.id), 15 Januari 2014.
19. Seluruh Fraksi DPRD DKI Setujui Usulan Hak Angket untuk Ahok, [news.liputan6.com](http://news.liputan6.com), 26 Februari 2015.
20. Survei Kompas: Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Ahok, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), 19 November 2015.